



KOMISI APARATUR
SIPIL NEGARA

KONDISI DAN ARAH REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA

Arie Budhiman

**Anggota KASN Bidang Pengawasan
Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik,
Kode Perilaku dan Netralitas ASN**

Arie Budhiman

Jakarta, 6 Juli 1959

Pendidikan

- S3 – Manajemen Bisnis, Universitas Padjadjaran (2007)
- S2 – Administrasi dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia (1996)
- S1 – Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN RI (1990)
- S1 – Fakultas Ekonomi, Universitas Trisakti (1984)

Pengalaman Tugas:

1. Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (2019-sekarang)
2. Staf Ahli Mendikbud Bidang Pembangunan Karakter (2016-2019)
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (2015-2016)
4. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta (2009-2015)
5. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta (2007-2009)
6. Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi DKI Jakarta (2004-2007)

Pengalaman Organisasi:

1. Dewan Penasehat Pengurus Daerah Keluarga Besar Putra-Putri Polri Metro Jaya (2015-2020)
2. Dewan Penasehat - Pengurus Daerah IX FKPPi Jakarta
3. Pengurus Rukun Warga 01 Kel. Menteng Dalam (2014-sekarang)
4. Pembina Yayasan Seni Budaya Jakarta, Pengelola Institut Kesenian Jakarta (2013-sekarang)
5. Pembina Yayasan Pariwisata Jayakarta, Pengelola Akademi Pariwisata Jakarta (2012-sekarang)



"Reformasi birokrasi adalah proses penataan birokrasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Keberhasilan reformasi birokrasi tercermin dari kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang semakin baik dan netralitas merupakan landasan utama bagi terwujudnya percepatan reformasi birokrasi tersebut"

Wakil Presiden RI

Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin



SISTEMATIKA

- 1. KEBIJAKAN INDONESIA MAJU**
- 2. REFORMASI BIROKRASI**
- 3. REKOMENDASI**

1. KEBIJAKAN INDONESIA MAJU



PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS



Pendekatan Teknologi

Pengembangan pelayanan pemerintahan dalam jaringan melalui sistem aplikasi digital. Perlu disiapkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (database, perangkat lunak dan perangkat keras)



Pendekatan Budaya Baru

Membangun otonomi, fleksibilitas dan kultur inovasi melalui jejaring kolaborasi ekosistem Birokrasi.



Pendekatan “Workplace”

Mengembangkan kesiapan fasilitas dan kenyamanan bekerja dengan skema Bekerja di Rumah, Bekerja di Kantor, dan Bekerja Dimana Saja.

Sumber: The Employee Experience Advantage (Jacob Morgan, 2017)



VISI PEMBANGUNAN INDONESIA 2045



Birokrasi Digital



Kultur Baru Birokrasi



Birokrasi Berbasis Kinerja

ASN yang profesional, bersih, kompeten, netral, dan berintegritas sangat berperan dalam menentukan efektifitas pemerintah mewujudkan visi pembangunan

VISI INDONESIA 2045: BERDAULAT, MAJU, ADIL DAN MAKMUR



Manusia Indonesia yang unggul, berbudaya, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi



Ekonomi yang maju dan berkelanjutan



Pembangunan yang merata dan inklusif



Negara yang demokratis, kuat, dan bersih

KONDISI LINGKUNGAN STRATEGIS: KASUS-KASUS KORUPSI 2004-2019

KORUPSI KEPALA DAERAH PER SEKTOR 2003-2019



593
(59.8%)

REKAPITULASI JUMLAH KORUPTOR YANG DITINDAK KPK
TAHUN 2004 - 2018



991



OTT KPK - Bupati Kutai Timur
Sumber: Detikcom, 2020

TOTAL: 114 KEPALA DAERAH

TOTAL: 991 ORANG

KONDISI LINGKUNGAN STRATEGIS: DATA KPK - JABATAN TERSANGKA

Sumber: KPK RI, Tahun 2020

DATA KEPALA DAERAH TERJERAT KORUPSI



Sekitar 64% kepala daerah yang ditangkap KPK adalah **Bupati (73 orang)**. Kemudian **Walikota 25** orang atau sekitar **24%**, sedangkan **Gubernur 16 orang (22%)**.

Tingginya angka Bupati yang ditangkap karena memang secara jumlah diantara ketiga Kepala Daerah tersebut bupati memiliki jumlah terbanyak sesuai dengan administrassi wilayah di Indonesia yakni 34 Provinsi, 416 Kabupaten dan 98 Kota.

KONDISI LINGKUNGAN STRATEGIS: PERINGKAT DAYA SAING INDONESIA

No.	Negara	Corruption Perception Index (2019)		Ease of Doing Business Ranking (2020)		Government Effectiveness Index (2019)		Human Development Index (2019)		Global Competitiveness Index (2019)	
		Peringkat	Nilai	Peringkat	Nilai	Peringkat	Nilai	Peringkat	Nilai	Peringkat	Nilai
1	Indonesia	85	40	73	69.6	95	54.71	111	0.707	50	64.6
2	Korea Selatan	39	59	5	84.0	41	80.77	22	0.906	13	79.6
3	Malaysia	51	53	12	81.5	51	75.96	61	0.804	27	74.6
4	Filipina	113	34	113	62.8	101	51.92	106	0.712	64	61.9
5	Singapura	4	85	2	86.2	1	100	9	0.935	1	84.8
6	Thailand	101	36	21	80.1	71	66.35	77	0.765	40	68.1
7	Vietnam	96	37	70	69.8	99	52.88	118	0.693	67	61.5

Sumber: World Economic Forum, World Bank, Transparency International, Worldwide Governance Indicator

5 PRIORITAS KERJA TAHUN KE DEPAN 2019-2024



PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

- penghubung produksi dan distribusi
- mempermudah akses wisata
- mendongkrak lapangan kerja
- nilai tambah perekonomian

SIMPLIFIKASI REGULASI

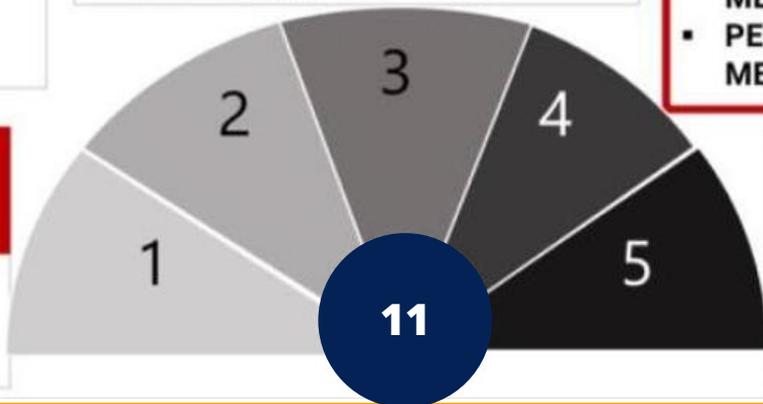
- Kendala regulasi disederhanakan, dipotong, dan dipangkas
- Omnibus Law

PENYEDERHANAAN BIROKRASI

- **PENYEDERHANAAN BIROKRASI MENJADI 2 LEVEL ESELON**
- **PERALIHAN JABATAN STRUKTURAL MENJADI FUNGSIONAL**

PEMBANGUNAN SDM

- SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, dan menguasai IPTEK
- Mengundang talenta global



TRANSFORMASI EKONOMI

- Daya saing manufaktur dan jasa modern bernilai tambah tinggi
- Penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran

2.

**REFORMASI
BIROKRASI**

ARAH KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI

RPJPN 2005-2025

ARAH KEBIJAKAN BIDANG APARATUR NEGARA

Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui **REFORMASI BIROKRASI** untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya.

RPJMN 4: 2020-2025

Pembangunan di bidang aparatur negara diarahkan pada **terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa** yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral.

Sumber: UU No. 17 Tahun 2005 tentang ASN RPJPN 2005-2025



Sumber: RPJMN 2020-2024

MANAJEMEN ASN



TUGAS DAN FUNGSI KASN

TUGAS KASN

1. Menjaga *netralitas Pegawai ASN*
2. Melakukan *pengawasan atas pembinaan profesi ASN*
3. Melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden.

FUNGSI KASN

KASN berfungsi *mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit* dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah.

Sumber: UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN

ARAH KEBIJAKAN

Penguatan implementasi manajemen ASN

SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya kualitas *penerapan sistem merit* dalam kebijakan dan manajemen ASN.
2. Meningkatnya kualitas *pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)*.
3. Meningkatnya kualitas *penerapan Nilai Dasar ASN, Kode Etik dan Kode Perilaku pegawai ASN, serta asas Netralitas pegawai ASN*.

Sumber: Renstra KASN 2020-2024

AREA PENGAWASAN KASN

4.189.121

PEGAWAI ASN

19.970

**JABATAN
PIMPINAN TINGGI**

719

**INSTANSI
PEMERINTAH**

PERMASALAHAN BIROKRASI DI INDONESIA

Sumber: Renstra KASN 2020-2024

- 1. Praktik korupsi** dalam berbagai bentuk seperti praktik pungutan liar, penyuapan terhadap pejabat pemerintah dan penyelenggara negara, mark up pengadaan barang dan jasa.
- 2. Inefisiensi birokrasi**, seperti dalam pengalokasian dan pengelolaan anggaran yang tidak didasarkan pada akuntabilitas kinerja.
- 3. Gap kompetensi** antara kebutuhan dan ketersediaan ASN, khususnya untuk menduduki jabatan-jabatan strategis dalam birokrasi.
- 4. Intervensi politik** yang kuat terhadap birokrasi dan ASN.

Berdasarkan permasalahan utama tersebut, Pemerintah Indonesia disarankan untuk memprioritaskan upaya *pencegahan korupsi* dalam berbagai bidang, khususnya yang terkait dengan pengembangan dunia usaha dan investasi, dan memfokuskan pelaksanaan *reformasi birokrasi* pada pembenahan manajemen ASN melalui *penerapan sistem merit* secara komprehensif mulai dari pengadaan/rekrutmen, penempatan dalam jabatan, penerapan sistem manajemen kinerja, pengembangan manajemen talenta dan *penegakan nilai dasar ASN, kode etik dan kode perilaku pegawai ASN* secara efektif dan tegas.

ANALISIS PENGELOLAAN ASN

Sumber: Renstra KASN 2020-2024

KEKUATAN (STRENGTH)

- Jumlah PNS 4,18 juta sebagai kekuatan pembangunan
- Penerapan Sistem Merit dalam manajemen ASN
- Penegakan Nilai Dasar ASN, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN
- Kekuatan ASN sebagai Perekat NKRI

KELEMAHAN (WEAKNESS)

- Mutu / Kompetensi ASN rendah
- Distribusi ASN tidak mencerminkan kebutuhan pembangunan
- Komposisi usia PNS/ASN makin menua
- Pejabat politik sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian

PELUANG (OPPORTUNITY)

- Kepercayaan publik pada pemerintah meningkat
- Perbaikan kualitas tata Kelola sektor publik (Peningkatan IEP, dan daya saing nasional)
- Pendekatan human capital dalam Manajemen ASN
- Revolusi Industri (4.0) untuk mendukung digitalisasi proses bisnis birokrasi

ANCAMAN (THREAT)

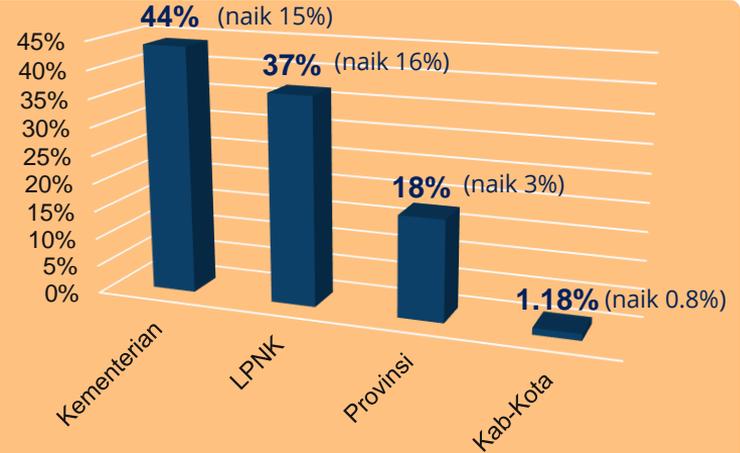
- Praktik jual beli jabatan birokrasi
- Tumbuhnya ideologi anti Pancasila dan intoleransi di lingkungan ASN
- Intervensi politik terhadap birokrasi (netralitas ASN)

KINERJA KASN

Sumber: Data KASN 2015-2020

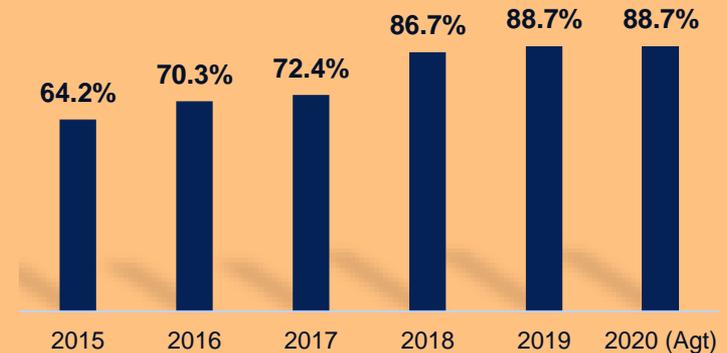
SISTEM MERIT

Persentase Instansi Pemerintah yang mendapat Indeks Sistem Merit dengan predikat Baik ke atas di tahun 2020



PENGISIAN JPT

Tingkat Kepatuhan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Tahun 2015-2020

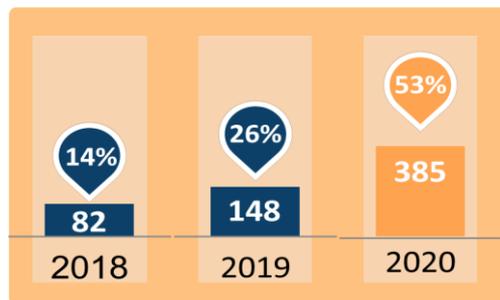


KINERJA KASN

Sumber: Data KASN 2015-2020

NDKEKP & NETRALITAS

Tingkat Kepatuhan Instansi Pemerintah dalam Penerapan NDKEKP



Jumlah Rekomendasi NDKEKP dan Netralitas ASN Tahun 2015-2020

No.	DATA	2015	2016	2017	2018	2019	2020 *Sept
1	REKOM NDKEKP	40	35	64	103	145	56
2	TL REKOM NDKEKP	3	12	11	87	76	27
3	% TL REKOM NDKEKP	18%	31%	14%	19%	52%	48.2%

No.	DATA	2015	2016	2017	2018	2019	2020 *Sept
1	REKOM NET	29	54	55	508	386	492
2	TL REKOM NET	7	11	9	20	148	256
3	% TL REKOM NET	10%	22%	20%	17%	38%	52.0%

PENGUATAN KERJASAMA PENGAWASAN



KASN dengan BAWASLU

No.4/PKS/KASN/6/2020 dan
No.155/K.Bawaslu/HM/02.00/VI/2020 Tanggal
17 Juni 2020

- Pertukaran Data/Informasi dalam Pengawasan Netralitas ASN
- Pencegahan: Kampanye Publik/Workshop/Seminar
- Pengawasan: Supervisi, Klarifikasi, Asistensi
- Penindakan: Penyampaian Dugaan Pelanggaran
- Monev: Tindaklanjut Rekomendasi



SKB 5 K/L tentang Pengawasan Netralitas

SKB KemenPANRB, Kemendagri, BKN, KASN, dan Bawaslu, ditandatangani tanggal 10 September 2020

- Terkait Tindaklanjut Rekomendasi KASN
- Pegawai ASN: **Data Administrasi Kepegawaian diblokir (SAPK)**
- PPK: Sanksi oleh MenPANRB atau Mendagri atas nama Presiden kepada Kepala Daerah selaku PPK (Pasal 33 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014)



Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

KPK Usulkan Sanksi Bagi Pejabat yang Abai Rekomendasi KASN

Kamis, 6 Agustus 2020 09:08



Sumber: tribunnews.com

BPK | BSSN

Dalam Proses

MANFAAT REFORMASI BIROKRASI



Bagi Kepala Daerah / Pejabat Pembina Kepegawaian

Target-target pemerintahan tercapai karena ASN lebih fokus pada kinerja dan tidak memikirkan politik



Bagi Birokrasi

- . Meningkatnya penerapan Sistem Merit dan kualitas Pelayanan Publik.
- . Birokrasi Independen, Transparan, dan Akuntabel
- . Imparsial dalam pelayanan publik, pengambilan kebijakan, manajemen ASN, dan politik



Bagi Pegawai ASN

Pengembangan Karir lebih terbuka dengan berpedoman pada Integritas, Kompetensi, dan Kinerja



Bagi Masyarakat

Masyarakat merasa dilayani dengan Adil dan Memuaskan

3.

REKOMENDASI

REKOMENDASI

- 1. Memperkuat peran KASN sebagai pengawal RB dan lembaga independen pengawas meritokrasi, kode etik, kode perilaku, dan netralitas ASN.**
- 2. Peran aktif instansi pemerintah dalam melaksanakan sistem merit, menerapkan pengisian JPT, mematuhi KE dan KP, serta ASN yang netral.**
- 3. Jalin sinergi pencegahan pelanggaran netralitas ASN melalui kolaborasi para pemangku kepentingan, baik antar instansi pemerintah, LSM, masyarakat, komunitas, dan media massa.**
- 4. Penguatan birokrasi berbasis digital melalui percepatan e-Government, terutama aplikasi e-Budgeting.**

TERIMA KASIH

KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Bidang Pengawasan Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN (NKK-NET)

Email: ndkekpn@kasn.go.id

*Bagi yang mengutip sebagian atau seluruh materi presentasi wajib mencantumkan sumber: KASN RI